

## ABSTRACT

Hana Christy Apriliany Matau. **AN ANALYSIS OF STATE OBLIGATIONS IN CONDUCTING EXTRADITION TO COMBAT TRANSNATIONAL CRIMES.** Supervised by Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H. and Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.

The obligation of states in addressing transnational crimes hinges on mitigating the multi-national nature of these offenses. This makes the prosecution and enforcement efforts require the mechanism of extradition. Extradition is defined as the surrender of a person by one state to another state that requests the surrender of an individual suspected or convicted of committing a crime outside the territory of the surrendering state but within the jurisdiction of the requesting state, which has the authority to prosecute and punish the individual. The findings of this study indicated that Indonesia's obligation as a state in carrying out extradition, whether to refuse or grant it, is correlated with efforts to mitigate transnational crimes. Therefore, such legal actions, along with their legal consequences, depend on the existence of international agreements. For Indonesia, refusal of extradition may result in the termination of established agreements or sanctions. Therefore, granting extradition should be considered to maintain the state's position until more detailed bilateral or multilateral extradition agreements are established, covering specific provisions. This study employed a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The objective was to analyze the state obligations in conducting extradition to combat transnational crimes and to analyze the legal consequences for states that do not extradite perpetrators of crimes. This study referred to Maria Lumowa extradition case, which involved Indonesia and the Netherlands, as well as Indonesia and Serbia. Through the analysis of this case, the researcher found that state obligations depend on treaties and national interests in the absence of established agreements.

**Keywords:** Extradition, State Obligations, Transnational Crimes.

## ABSTRAK

Hana Christy Apriliany Matau. **ANALISIS KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELAKUKAN EKSTRADISI UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL.** Dibimbing oleh Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H. dan Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.

Kewajiban negara dalam menanggulangi kejahatan transnasional bertumpu pada upaya memitigasi sifat multi-nasional dari kejahatan transnasional yang membuat upaya penindak dan penegakan memerlukan perangkat ekstradisi. Ekstradisi merupakan penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Hasil penelitian mengemukakan kewajiban Indonesia sebagai negara dalam melaksanakan ekstradisi, baik menolak atau memberikan, berkorelasi pada upaya memitigasi kejahatan transnasional sehingga tindakan hukum tersebut beserta dengan akibat hukum dibaliknya bergantung pada apakah ada perjanjian antar negara yang telah terjalin. Bagi Indonesia, penolakan ekstradisi dapat berakibat berakhirnya perjanjian yang dijalin atau sanksi sehingga pemberian ekstradisi patut dipertimbangkan agar kedudukan negara dapat dipertahankan hingga terjalinya perjanjian ekstradisi bilateral atau multilateral yang lebih rinci dan mencakup ketentuan-ketentuan khusus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan corak pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan tujuan untuk menganalisis kewajiban negara dalam melakukan ekstradisi untuk menanggulangi kejahatan transnasional serta menganalisis akibat hukum negara pihak yang tidak memberikan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan. Hasil penelitian ini merujuk pada kasus ekstradisi Maria Lumowa yang melibatkan antara Indonesia dan Belanda serta Indonesia dan Serbia. Melalui analisa terhadap kasus tersebut, maka peneliti menemukan bahwa kewajiban negara bergantung kepada perjanjian dan kepada kepentingan nasional apabila tidak ada perjanjian yang terjalin.

**Kata Kunci:** Ekstradisi, Kewajiban Negara, Kejahatan Transnasional